

KEMENTERIAN LUAR NEGERI (BA 011)

Kementerian Luar Negeri merupakan kementerian yang bertugas untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri. Tugas pokok Kementerian Luar Negeri adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga melaksanakan dukungan yang bersifat substantif, administratif dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, anggaran Kementerian Luar Negeri mengalami pertumbuhan rata-rata 3-4% dan tidak terjadi peningkatan anggaran yang signifikan pada periode tersebut. Pada TA 2020, pagu awal Kementerian Luar Negeri adalah sebesar Rp8.686,0 Miliar. Namun sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 Kemlu dikenakan penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri sebesar Rp870,5 Miliar. Kementerian Keuangan selanjutnya melalui surat Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020 telah menyesuaikan pemotongan anggaran Kemlu menjadi sebesar Rp1.083,5 Miliar atau meningkat sebesar Rp213,1 Miliar. Kemlu pada TA 2020 juga mendapatkan insentif anggaran atas capaian kinerja penggunaan anggaran pada TA 2019 untuk K/L Kategori Pagu Sedang sebesar Rp60.0 Miliar. Dengan demikian, maka alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2020 setelah penghematan adalah sebesar Rp7.662,5 Miliar. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri juga menyesuaikan Pagu Alokasi yang bersumber dari PNBPNP sebesar Rp171,9 Miliar sebagai akibat berkurangnya setoran PNBPNP

Kementerian Luar Negeri karena dampak pandemi Covid-19, sehingga Pagu akhir Kementerian Luar Negeri TA 2020 sebesar Rp7.490,5 Miliar atau turun 6,8% dibanding Pagu TA 2019.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Luar Negeri telah melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp100 Miliar untuk penanganan Covid-19 bagi WNI di luar negeri. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri juga mendapatkan insentif anggaran atas capaian kinerja penggunaan anggaran TA 2017 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp111 Miliar dan Rp80 Miliar.

Pada TA 2021, pagu awal Kementerian Luar Negeri sebesar Rp8.205,3 Miliar. Pada TA berjalan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan 3 kali penghematan/penyesuaian atas pagu alokasi anggaran tersebut sebagai akibat dan dampak dari pandemi Covid-19 dengan total sebesar Rp287,8 Miliar. Selain itu, Kementerian Luar Negeri menerima Anggaran Tambahan sebesar Rp78,9 Miliar. Dengan adanya beberapa penghematan, alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2021 pada akhir tahun adalah sebesar Rp7.745,9 Miliar. Salah satu perubahan signifikan pada TA 2021 adalah perubahan Struktur Program, Kegiatan dan Keluaran menindaklanjuti Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dimana sebelumnya memiliki 12 Program menjadi 5 Program.

Pada TA 2022, Sebagai pengejawantahan RPJMN 2020-2024, penyelenggaraan politik luar negeri bertumpu pada prioritas 4+1 yaitu: penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; dan peran Indonesia di kawasan

dan global, serta penguatan infrastruktur diplomasi.

Sejalan dengan prioritas tersebut, fokus Kementerian Luar Negeri pada tahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2023 adalah:

(i) penguatan diplomasi ekonomi dengan penekanan pada kapitalisasi penguatan pasar domestik, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional, penguatan perundingan perdagangan dan investasi, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong *outbound investment*, peningkatan diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia;

(ii) Meningkatkan sistem perlindungan WNI di luar negeri melalui penguatan perlindungan WNI di luar negeri, penguatan infrastruktur perlindungan WNI, pemutakhiran data WNI di luar negeri dan peningkatan pelayanan kekonsuleran;

(iii) Melanjutkan perundingan batas maritim RI dengan negara tetangga melalui upaya peningkatan intensitas perundingan batas darat dan maritime serta penguatan upaya menjaga integritas kedaulatan NKRI;

(iv) Penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional antara lain penguatan kepemimpinan dan peran Indonesia di dunia internasional, penguatan Kerjasama pembangunan dengan negara mitra, melanjutkan komitmen pemajuan dan perlindungan HAM, berperan aktif dalam isu kemanusiaan dan keketuaan Indonesia pada ASEAN;

Serta untuk menunjang prioritas politik luar negeri tersebut, Kementerian Luar Negeri akan memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur diplomasi melalui penguatan infrastruktur diplomasi, antara lain penguatan sarana dan prasarana Perwakilan RI, transformasi digital, penguatan sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri, serta peningkatan aspek

kesejahteraan khususnya untuk Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan RI.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan melalui surat bersama No. S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022, telah menetapkan Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2023 sebesar **Rp8.689.04 Miliar**. Pagu Anggaran Kemlu TA 2023 naik sebesar **Rp637.75 Miliar** (atau naik sebesar 7,92%) dibandingkan dengan anggaran TA 2022 sebesar **Rp8.051,29 Miliar**.

Pagu tersebut dialokasikan untuk menjalankan prioritas politik luar negeri dengan fokus prioritas TA 2023, yaitu, diplomasi ekonomi untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, yang juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Selain itu, fokus utama program kerja Kementerian Luar Negeri pada tahun 2023 antara lain memperkuat perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan, serta meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Kementerian Luar Negeri merencanakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) output prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Keketuaan Indonesia pada MIKTA tahun 2023;
- b. Optimalisasi Kontribusi Indonesia Dalam Jajaran 10 Besar Negara Pengirim MPP PBB;
- c. Pengarusutamaan SDGs dalam Diplomasi Komoditas Berkelanjutan;
- d. Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023;
- e. Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste; Verifikasi dan Updating Batas Maritim Rangka Mendukung Kebijakan Satu Peta; dan
- f. Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Perwakilan RI.

Pada TA 2024 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan melalui Surat Bersama No. B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan No. S-287/MK.02/2023 menetapkan Pagu Indikatif Kemlu TA 2024 sebesar **Rp8.247,79 Miliar**. Pagu Indikatif TA 2023 tersebut turun sebesar 5,08% dibandingkan dengan pagu TA 2023 sebesar **Rp8.689,04 Miliar**.

Pagu TA 2024 tersebut dialokasikan untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah TA 2024 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang merujuk pada Prioritas Polugri 4+1 dengan highlight kegiatan sebagai berikut:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional

Berupa penguatan diplomasi ekonomi bagi peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi, pemulihan ekonomi melalui optimalisasi FTA, CEPA, PTA dan kerja sama lain yang mendukung resiliensi ekonomi nasional, percepatan perundingan, dukungan pameran dagang misi bisnis dan budaya dalam rangka penguatan hubungan bilateral, peningkatan citra Indonesia untuk mendukung stabilitas NKRI dan percepatan produktivitas ekonomi nasional, peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor Indonesia di pasar non tradisional, serta kajian terkait isu strategis guna mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi.

2. Penegakan Kedaulatan Serta Hukum dan Perjanjian Internasional

Berupa perundingan batas laut Indonesia dengan prioritas Malaysia, Filipina, Palau dan Vietnam, pelaksanaan *Internal Process* dan proses implementasi persetujuan *realignment* batas FIR dengan Singapura serta tindak lanjut konsultasi dengan ICAO dan Malaysia, Revisi UU Perjanjian Internasional, verifikasi dan *updating* Batas Maritim RI dengan Negara Tetangga dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta,

penyusunan posisi delegasi RI dan perundingan perjanjian di bidang sosial ketenagakerjaan, serta kajian Konvensi-konvensi Internasional di bidang ketenagakerjaan.

3. Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik

Berupa peningkatan kualitas pelindungan WNI di luar negeri melalui penyelesaian kasus dan *family engagement*, fasilitasi pemulangan WNI, serta bantuan hukum dan fasilitasi layanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kekonsuleran di Perwakilan RI melalui kegiatan audit aplikasi dan TIK, pembangunan IDOC, pengembangan aplikasi dan penguatan infrastruktur sistik, sertifikasi ISO20000, ISO27001, dan ISO27701, serta monitoring dan evaluasi pemberian fasilitas diplomatik untuk PNA dan OI.

4. Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral

Berupa optimalisasi pengelolaan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional, optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB, Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2024, penyelenggaraan *ASEAN Creative Economy Business Summit (ACEBS) 2024*, partisipasi dalam *ASEAN-US Coordinationship: 36th ASEAN-US Dialogue & International Workshops on Building Network between ASEAN-US Startups*, pengarusutamaan implementasi dan tindak lanjut kerja sama dengan Mitra Wicara (*AOIP, Pacific Island Forum, Electronic Vehicle Ecosystem, dll.*), pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030, optimalisasi keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB 2024-2026, Kepemimpinan Indonesia pada APEC dan IORA

5. Dukungan Manajemen

Berupa pemenuhan belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang operasional), pelaksanaan strategi pemindahan Aparatur Sipil

Negara (ASN) Kemlu ke Ibu Kota Nusantara (IKN), penyesuaian besaran ADTLN dan fasilitas restitusi pengobatan dan penguatan Infrastruktur Diplomasi antara lain melalui:

- a) Renovasi gedung lama dan rusak pada Satker Pusat dan Perwakilan;
- b) Pemenuhan fasilitas pengamanan di Perwakilan Rawan dan Berbahaya; dan
- c) Manajemen aset Kemlu yang terintegrasi melalui percepatan transformasi digital dengan peningkatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Lampiran 2
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Luar Negeri Tahun 2019-2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Keketuaan Indonesia pada MIKTA Tahun 2023 (Forum)	-	-	-	-	13	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB (Kegiatan/Laporan)	14	5	23	22	15	26	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Diplomasi Komoditas Berkelanjutan (Kegiatan)	-	-	-	6	6	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	25	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Perundingan Batas Maritim, Implementasi Perjanjian Pengelolaan Ruang Udara, Pemutakhiran Kebijakan Satu Peta (Kesepakatan)	8	1	8	8	8	8	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri-Pusat (Dokumen/Orang)	12	17	102.678	21.197	23.862	25.055	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri-Perwakilan RI (Orang)	225.247	574.306	523.862	138.000	243.379	287.147	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik